

BAB III

PERISTIWA 17 OKTOBER 1952

A. Kondisi Politik di Lingkungan Angkatan Darat

Sebagaimana lazimnya suatu perundingan politik, maka diadakannya Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Negara Belanda pada bulan Desember tahun 1949, juga diwarnai tawar-menawar antara Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda. Langkah maju yang dihasilkan delegasi Indonesia adalah diakuinya Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat penuh, dan sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Tapi akibat tak langsung dari negosiasi di konferensi itu, ternyata seperti halnya “menyimpan api dalam sekam” di dalam kehidupan sosial politik Indonesia, yakni diubahnya sistem penyelenggaraan pemerintahan dari sistem demokrasi parlementer dengan diberlakukannya konstitusi UUD Sementara (UUDS) tahun 1950.¹

Sistem parlemen yang dianut setelah tahun 1950 menyerukan suasana politik dalam negeri. Partai-partai politik tumbuh seperti jamur dan mudah sekali jatuh karena tidak ada partai politik yang cukup besar untuk menguasai

¹ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Jenderal Tanpa Pasukan Politisi Tanpa Partai: Perjalanan Hidup A. H. Nasution* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1998), p.80

parlemen secara stabil. Dalam kondisi demikian PKI berhasil tumbuh kembali dan bahkan dapat mendapat rehabilitasi sebagai partai politik yang resmi. Inilah yang menjadi sumber keonaran dalam negeri.² Jadi di dalam sistem ini kekuasaan politik dan *decision maker* adalah partai politik saja. Presiden dan kaum militer merupakan kekuatan politik yang sifatnya ekstra parlementer dengan kekuasaannya yang terbatas sekali. Kalau mengingat peranan presiden dan kaum militer dalam menegakkan kemerdekaan yang besar, maka konsekuensi dari sistem pemerintahan ini dari satu segi tidak memuaskan pihak militer, yang justru merasa dirinya sebagai pemegang panji dalam masa-masa menegakkan Republik Indonesia.³

Pada awal tahun tahun 1950, Panglima Besar Jenderal Soedirman yang sangat kritis dan memiliki kewibawaan yang besar dan berpengaruh dalam kehidupan ketentaraan dan politik, meninggal dunia karena jatuh sakit.⁴ Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX dihadapkan kepada masalah pembentukan sebuah kelompok pimpinan baru bagi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Jabatan Panglima Angkatan Perang dihapuskan karena telah membentuk kelompok pimpinan baru yaitu (APRIS), dan Simatupang diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Perang

² A. H. Nasution, *Peristiwa 17 Oktober 1952* (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2010), p.87

³ Yahya A. Muhaimin, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), 72

⁴ Abdoel Fattah, *Demiliterisasi Tentara Pasang Surut Politik Militer 1945-2004* (Jakarta: LKIS, 2005), p.91

(KSAP), Kolonel A. H. Nasution diberi jabatan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Komodor Suryadharma sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) dan Subijakto menjadi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL). Kolonel Hidayat ditempatkan sebagai perwira dengan pangkat yang paling tinggi dalam Kementerian Pertahanan. Dengan demikian, semua jabatan paling atas dalam angkatan perang dipegang oleh perwira-perwira bekas KNIL.⁵

Tokoh-tokoh sipil seperti Sultan Syahrir misalnya, mempunyai pandangan yang berbeda dalam hal “arti” dan “rasa” berjasa suatu kekuatan politik tertentu dalam perjuangan revolusi kemerdekaan. Bagi kedua tokoh sipil itu, “arti” dan “rasa” berjasa tadi semestinya bisa direduksi sebagai manifestasi praksis dari *front* persatuan seluruh komponen pejuang revolusioner. Kemerdekaan, begitu argumentasi kedua tokoh sipil itu, sesungguhnya tak semata-mata adalah jasa tentara karena “lahir dari sebuah kancah revolusi nasional”.⁶

Keterikatan mereka kepada prinsip supremasi sipil atas militer bisa diharapkan lebih kuat dibandingkan dengan perwira-perwira bekas PETA, atau para perwira berasal dari organisasi kelaskaran dan pemuda, mengingat bahwa mereka telah mendapat latihan dan pendidikan Belanda. Walau

⁵ Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967* (Jakarta: LP3ES, 1986), 87

⁶ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Jenderal Tanpa Pasukan Politisi Tanpa Partai: Perjalanan Hidup A. H. Nasution* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1998), p.83

demikian, kekeliruan untuk memandang perwira-perwira itu semata-mata sebagai prajurit profesional tanpa keyakinan-keyakinan politik.⁷

Kondisi ini mengakibatkan tumbuhnya konflik antara politisi sipil dengan militer. Di samping itu, ada juga sebagian perwira militer yang tidak bisa menerima begitu saja supremasi sipil. Para anggota politik juga tidak bisa membuat pemerintahan stabil. Karena pergolakan antara partai menyebabkan anggota parlemen sering menjatuhkan kabinet. Kondisi politik yang tidak menentu itu menyebabkan tentara turut serta dalam pembinaan negara dengan ikut menentukan proses politik. Selanjutnya, TNI secara resmi dapat masuk dalam kelembagaan politik setelah diakuinya militer menjadi salah satu kekuatan politik sebagai golongan fungsional.⁸

Pakar militer Eric Nordlinger pernah menyatakan bahwa motif atau mungkin faktor utama yang mendorong militer menentang politisi sipil adalah pembelaan kepentingan kelompok. Motif yang lain adalah kelompok militer ikut terlibat dalam soal-soal politik bahkan mengambilalih pemerintahan di banyak negara dunia berkembang adalah banyaknya kebijakan pemerintahan sipil yang mengancam otonomi dan eksklusif militer.⁹

⁷ Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967* (Jakarta: LP3ES, 1986), p. 88

⁸ Abdoel Fattah, *Demiliterisasi Tentara Pasang Surut Politik Militer 1945-2004* (Jakarta: LKIS, 2005), p.91

⁹ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Jenderal Tanpa Pasukan Politisi Tanpa Partai: Perjalanan Hidup A. H. Nasution* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1998), p.81

Kajian menyangkut pandangan, gagasan, dan konsep akan posisi dan fungsi militer di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari latar belakang karir pendidikan kemiliteran A. H. Nasution di KNIL. Suatu hal yang tentu berbeda dengan mereka yang berasal dari Laskar Rakyat, atau PETA misalnya. Tapi realitas kemasyarakatan pada masa A. H. Nasution menjabat sebagai KSAD pada awal 1950-an itu dapat dipandang sebagai suatu masa yang serba darurat, merosot, dan tidak stabil, baik secara politik maupun ekonomi. Situasi tersebut jelas berpengaruh kepada institusi militer. Beratnya beban anggaran membuat A. H. Nasution selaku KSAD ingin melakukan beberapa tindakan penghematan. Termasuk perampingan organisasi agar terlihat lebih efisien, rasional, modern dan profesional. Rencana A. H. Nasution untuk melakukan reorganisasi dan rasionalisasi itulah yang kemudian menimbulkan ke tidak setujuan beberapa perwira staf AD sendiri, seperti Kolonel Bambang Supeno.¹⁰

B. Latar Belakang Peristiwa 17 Oktober 1952

Hubungan TNI dengan DPRS selanjutnya semakin runyam dengan timbulnya berbagai permasalahan, seperti kritik terhadap militer dalam usaha

¹⁰ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Jenderal Tanpa Pasukan Politisi Tanpa Partai: Perjalanan Hidup A. H. Nasution* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1998), p.84

untuk memodernisasi Angkatan Perang, pendidikan dan latihan kemiliteran yang menggunakan tenaga ahli tentara Belanda.¹¹

Pada tanggal 13 Juli 1952 Kolonel Bambang Supeno salah satu tokoh yang tidak setuju kebijakan KSAD yang ingin merampingkan organisasi agar lebih efisien, rasional, modern dan professional yaitu melakukan reorganisasi dan rasionalisasi, ia menulis surat kepada Menteri Pertahanan dengan tembusan kepada parlemen yang isinya tidak setuju atas beberapa kebijakan Pimpinan Angkatan Darat. Atas tembusan surat Kolonel Bambang Supeno, di Parlemen, dibicarakan kebijakan KSAD. Di samping itu ada dua anggota parlemen dari Indonesia Timur yaitu Babasa Daeng Lolo dan Rondonuwu telah mengirimkan surat kepada pemerintah yang mencela kebijakan Kolonel Gatot Subroto Panglima TT VII/Indonesia Timur dalam melaksanakan pemulihan keamanan di Sulawesi Selatan. Pada saat itu di Makasar Sulawesi Selatan masih ada sisa-sisa kelompok Andi Aziz yang telah melakukan pemberontakan kepada Pemerintah RI menolak kedatangan TNI dari Jawa dan tetap ingin menjadi Negara Federal Indonesia Timur lepas dari Republik Indonesia.¹²

Sebagai KSAD A. H. Nasution menyadari munculnya rasa ke tidak puas terhadap kepemimpinannya dari kalangan perwira tertentu di tubuh

¹¹ Naswir Abu Nain, *Angkatan 66 Dalam Lintasan Sejarah Perjuangan Bangsa* (Jakarta: Cipro Media, 2011), p.18

¹² A. H. Nasution, *Peristiwa 17 Oktober 1952* (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2010), p.72-73

AD. Bahkan para perwira tersebut menempuh cara-cara yang dinilai melanggar disiplin militer dan hirarki komando yang berlaku di tubuh AD. Pada tanggal 14 Juli 1952, terjadi pertemuan antara Presiden Soekarno dengan Menteri pertahanan (Menhan) Hamengkubuwono IX dan para pejabat militer. Dalam pertemuan tersebut Presiden mempertanyakan berbagai persoalan yang diajukan Bambang Supeno kepada Menteri Pertahanan Hamengkubuwono IX, KSAP Simatupang dan segenap kepala staf, termasuk KSAD A. H. Nasution.¹³

Rupa-rupanya pada kesempatan itu Presiden Soekarno dengan jelas menunjukkan bahwa ia memihak Bambang Supeno. Sebagai jawaban Sultan menyatakan bersedia memikul seluruh tanggung jawab atas perubahan pembaharuan dalam Angkatan Darat, dan dengan demikian mengikat kabinet kepada pimpinan Angkatan Darat. Simatupang menjelaskan bahwa seluruh peristiwa itu menyebabkan pimpinan Angkatan Darat Bersenjata tidak melakukan tugas mereka. A. H. Nasution lebih tegas lagi, ia menyatakan kesediaannya untuk mengundurkan diri jika Panglima tidak percaya lagi kepadanya, atau jika presiden mencurigainya. Tetapi Presiden Soekarno menolak tawaran A. H. Nasution untuk meletakkan jabatan.¹⁴

¹³ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Jenderal Tanpa Pasukan Politisi Tanpa Partai: Perjalanan Hidup A. H. Nasution* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1998), p.84

¹⁴ Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967* (Jakarta: LP3ES, 1986),p.114

Selain kasus Bambang Supeno, kepemimpinan A. H. Nasution juga dirundingkan masalah berkurangnya wibawa dan kepercayaan terhadap pimpinan pusat AD. Dengan adanya pimpinan AD yang bermoral rendah, juga kurangnya tunjangan ekonomi terhadap prajurit dan perwira, dan masih adanya program *Nederlandsche Militaire Missie* (NMM), pendidikan model Belanda itu diragukan keberhasilannya untuk membentuk karakter perwira yang nasionalistik-revolusioner.¹⁵

Pada tanggal 28 Juli 1952 persoalan Kolonel Bambang Supeno menulis surat kepada Menteri Pertahanan mulai dibahas dalam parlemen yang dalam tempo sepuluh minggu berikutnya mengadakan empat sidang rahasia dan tujuh belas sidang terbuka untuk membicarakan kebijaksanaan pertahanan pada umumnya, dan kebijaksanaan Angkatan Darat pada khususnya. Kecaman-kecaman yang dilancarkan terhadap Menteri Pertahanan, Simatupang dan para pemimpin Angkatan Darat menyangkut berbagai soal, mulai dari soal penanganan Keadaan Perang dan Darurat Perang sampai kepada cara Bambang Supeno diperlakukan oleh atasan-atasannya, dan juga mencakup kecaman terhadap rencana baru pemerintah untuk secara bertahap memberhentikan 80.000 prajurit lagi dari dinas militer yang ketika itu berkekuatan 200.000 orang.¹⁶

¹⁵ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Jenderal Tanpa Pasukan Politisi Tanpa Partai: Perjalanan Hidup A. H. Nasution* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1998), p.85

¹⁶ Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967* (Jakarta: LP3ES, 1986),p.114

Pemberhentian masal seperti itu dianggap perlu oleh kabinet dan pimpinan tentara mengingat akan adanya pengurangan yang drastis dalam anggaran belanja untuk tahun 1953 yang diperkirakan akan mengakibatkan berkurangnya alokasi bagi Angkatan Darat dari Rp. 2.625 juta dalam tahun 1952 menjadi sekitar 1.900 juta.¹⁷

Tetapi program dari pimpinan TNI tersebut tidak disetujui oleh beberapa kalangan TNI sendiri, terutama oleh anggota-anggota tentara dahulu yang berasal dari bekas-bekas PETA dan Laskar, yang begitu dekat dengan Presiden Soekarno karena perasaan “bapakisme” mereka. Tantangan terhadap kebijakan pemerintah dalam bidang militer ini bukan saja karena mengakibatkan demobilisasi besar-besaran tetapi terutama karena memang adanya perasaan tidak puas serta perpecahan di dalam tubuh TNI, yaitu antara kelompok yang menghendaki *profesionalisme* dalam tubuh TNI dengan yang menentang profesionalisme. Oposisi terhadap reorganisasi dan rasionalisasi militer itu mempunyai dukungan politik yang cukup besar, ialah dari PNI terutama dari grup Sidik dan dari Presiden Soekarno. Karena hal inilah maka konflik intern dalam tubuh TNI tersebut terproyeksi kepada *political community* yang luas.¹⁸

¹⁷ Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967* (Jakarta: LP3ES, 1986), p.115

¹⁸ Yahya A. Muhaimin, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), 74

Konflik itu membuat para wakil rakyat merasa perlu menyelamatkan keutuhan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). Sebab, bagaimana pun “perpecahan” di tubuh AD dapat membahayakan integritas republik. Serangan umum parlemen dimulai, istilah itu digunakan KSAD A. H. Nasution terhadap serangan yang ditujukan pada dirinya akibat serangkaian rapat pleno DPR sejak 23 September 1952.¹⁹ Di dalam parlemen terjadi perdebatan hangat mengenai masalah Angkatan Perang dan anggota parlemen terjadi saling tuduh menuduh bahwa ada partai atau golongan tertentu yang hendak menguasai Angkatan Perang dan Kementerian Pertahanan. Perdebatan parlemen menghasilkan adanya tiga buah usul mosi (pendapat) yaitu usul mosi Zainul Baharuddin dan kawan-kawan, usul mosi I. J. Kasimo dan kawan-kawan, usul mosi Manai Sophian dan kawan-kawan.²⁰

Zainul Baharuddin dengan sokongan tokoh politik dari partai-partai kiri, mengajukan mosi tidak percaya terhadap Menteri Pertahanan. Atas inisiatif Ir. Sakiman dari PKI, mosi ini agak diperlunak untuk memungkinkan PNI memberikan suara menentang pemerintah. Mosi itu menghendaki diadakannya “reformasi dan reorganisasi dalam pimpinan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata” dan pembentukan sebuah komisi

¹⁹ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Jenderal Tanpa Pasukan Politisi Tanpa Partai: Perjalanan Hidup A. H. Nasution* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1998), p.86

²⁰ A. H. Nasution, *Peristiwa 17 Oktober 1952* (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2010), p.73

parlemen untuk menyelidiki penyelewengan-penyelewengan administrasi dan keuangan di dalam Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata.

Walau pendukung mosi ini mengisyaratkan bahwa mosi tersebut ditujukan terhadap Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan dan terhadap Simatupang serta A. H. Nasution, Sultan menegaskan bahwa ia akan menganggapnya sebagai mosi tidak percaya terhadap dirinya sendiri. Karena ia dapat mengandalkan setia kawan dari sekurang-kurangnya PSI dan kedua partai Kristen (Perkindo dan katolik) dalam persoalan ini, maka pengunduran dirinya akan mengakibatkan mundurnya semua menteri dari partai-partai itu. Tanpa mereka kabinet tidak mungkin bisa terus bertahan. Dengan demikian, maka mencela pimpinan Angkatan Darat dalam kenyataannya akan mengakibatkan jatuhnya kabinet.²¹

Setelah melalui pungutan suara, parlemen menerima usul mosi Manai Sophian yang isinya antara lain mendesak pemerintah agar membentuk suatu panitia yang terdiri dari anggota-anggota parlemen dan wakil-wakil pemerintahan untuk menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam perdebatan-perdebatan di Parlemen mengenai Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang serta menyampaikan usul-usul kongkret mengenai penyelesaiannya kepada pemerintah. Dengan diterimanya mosi Manai Sophian, pimpinan Angkatan Darat merasa bahwa parlemen telah

²¹ Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967* (Jakarta: LP3ES, 1986),p.116-117

mencampuri urusan eksekutif (pemerintah) khususnya masalah intern Angkatan Darat, dan Angkatan darat sudah ditarik untuk ikut polemik masalah politik.²²

A. H. Nasution sebagai KSAD merasa kecewa atas putusan tersebut. Menurutnya, mereka yang terlibat dalam keputusan menelorkan mosi itu adalah kawan-kawan seperjuangannya pada masa Ibukota Republik berada di Yogyakarta. Ia juga merasa bahwa selama ini, telah berkali-kali mewakili APRI dalam sidang seksi pertahanan DPR yang menurutnya berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Tidak seperti di Jakarta, suasana yang ada adalah kecurigaan bahkan permusuhan terhadap Angkatan Perang dan tuduhan yang paling menyakitkan ialah tuduhan anti-patriotisme, tuduhan sebagai alat imperialisme dan tuduhan telah diperalat suatu partai.²³

Sementara itu, melihat kesibukan-kesibukan kalangan pimpinan TNI dan para perwira TNI sejak awal Oktober 1952, maka dengan adanya perkembangan di dalam parlemen itu tidaklah mungkin pimpinan militer yang merasa urusannya dicampuri orang non-militer akan tinggal diam.²⁴ Untuk menyelesaikannya serta mempertahankan keutuhan dan integritas Angkatan Darat, maka pada tanggal 16 Oktober 1952, rapat staf umum

²² A. H. Nasution, *Peristiwa 17 Oktober 1952* (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2010), p.73-74

²³ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Jenderal Tanpa Pasukan Politisi Tanpa Partai: Perjalanan Hidup A. H. Nasution* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1998), p.86

²⁴ Yahya A. Muhaimin, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), p.77

Angkatan Darat dengan para Panglima Teritorium diadakan. Hasil rapat tersebut berupa petisi kepada Panglima tertinggi presiden Soekarno yang ditandatangani oleh KSAD beserta tujuh Panglima Daerah dan delapan pejabat teras Markas Besar Angkatan Darat.

Petisi tersebut berisi beberapa hal. *Pertama*, masalah usia kabinet yang pendek, hingga tidak satu pun kabinet yang mampu melaksanakan program kerjanya. *Kedua*, kesulitan yang dihadapi kabinet adalah menghadapi parlemen, 2/3 anggotanya berasal dari bekas negara-negara federal buatan Belanda yang sebelumnya menentang Republik Indonesia. *Ketiga*, meminta presiden membubarkan parlemen dan membentuk parlemen baru dalam waktu singkat dengan memperhatikan kehendak rakyat melalui pemilihan umum. *Keempat*, mosi Manai Sophian menurut pendapat Angkatan Darat telah ikut campur dalam mengatur Angkatan Darat.²⁵

C. Jalannya Peristiwa 17 Oktober 1952

Pada tanggal 17 Oktober 1952 di Markas Besar Tentara, pengambil inisiatif utamanya adalah Kolonel Soetoko dan Kolonel S. Parman. Tetapi demonstran di jalan diorganisasikan oleh Kolonel Dr. Mustopo, seorang yang eksentrik yang mengepalai Dinas Kedokteran Gigi Angkatan Darat dan Perwira Penghubung Presiden Soekarno, serta Mayor Kosasih, Komando

²⁵ Abdoel Fattah, *Demiliterisasi Tentara Pasang Surut Politik Militer 1945-2004* (Jakarta: LKIS, 2005), p.96

Garnisun Jakarta. Seksi Intel Divisi Siliwangi mengarahkan kaum demonstran dari luar Ibukota dengan menggunakan truk-truk tentara. Di samping itu, pasukan dengan tank serta meriam muncul di Lapangan Merdeka dan beberapa pucuk meriam diarahkan ke istana presiden. Pasukan itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Kemal Idris, seorang perwira Siliwangi yang cenderung ke PSI (Partai Serikat Indonesia). Rupa-rupanya Kolonel Kemal Idris telah mendapat perintah untuk “memamerkan kekuatan”, tetapi ia tidak diberi wewenang untuk melibatkan pasukannya ke dalam sesuatu tindakan.²⁶

Terjadinya demonstrasi rakyat yang mengejutkan melanda Jakarta, dilakukan oleh mula-mula sekitar 5000 orang dan kemudian bertambah sampai mencapai kira-kira 30.000 orang.²⁷ Pertama kaum demonstran itu menuju ke tempat gedung parlemen, dan setelah itu berbondong-bondong menuju ke istana presiden untuk menyampaikan tuntutan. Para demonstran pada pokoknya kepada presiden menuntut “supaya presiden membubarkan DPRS yang ada karena sudah tidak efektif yang telah ikut campur dalam urusan militer dan kemudian digantikan DPRS yang baru. Di sekitar Istana berdiri mobil-mobil berlapis baja dan tank serta beberapa meriam dan senapan mesin di atas mobil jelas kelihatan diarahkan tepat ke

²⁶ Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967* (Jakarta: LP3ES, 1986),p.123

²⁷ M.C Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Jakarta:PT Serambi Ilmu Semesta 2008),p.510

tempat Presiden Soekarno berbicara.²⁸ Akibatnya, roda pemerintahan menjadi tidak efektif, program pembangunan tidak terlaksana, dan persitegangan politik mudah sekali terjadi.²⁹

Presiden Soekarno berbicara kepada massa yang berdemonstrasi Menunjuk kepada tuntutan mereka agar ia membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakannya pemilihan umum, Presiden Soekarno menjelaskan bahwa pemilihan umum memerlukan persiapan yang tidak sedikit.³⁰ Namun demikian, Presiden Soekarno sependapat dengan mereka bahwa pemilihan umum itu harus diadakan secepat mungkin. Tetapi membubarkan DPRS dan menyerahkan semua kekuasaan kepada kekuasaan eksekutif saja dari pemerintahan akan berarti menjadikan dirinya diktator. Karena hal itu tidak sesuai dengan ideologi negara, maka ia harus menolak tuntutan demonstran itu, Soekarno lalu memerintahkan massa supaya bubar.³¹

Pada saat yang bersamaan Presiden Soekarno sedang menerima delegasi Angkatan Darat yang dipimpin oleh KSAD Jenderal A. H. Nasution didampingi Kolonel TB Simatupang beserta para Panglima TT dan pemimpin Angkatan Darat yaitu Kolonel M. Simbolon, Letkol Kosasih, Letkol M.

²⁸Yahya A. Muhaimin, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005),p.77.

²⁹A. Pambudi, *Supersemar Palsu Kesaksian Tiga Jendral* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006),p.218.

³⁰ Ahmad Mansyur Suryanegara, *Api Sejarah 2* (Bandung: Salamadani, 2010),p.341.

³¹ Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967* (Jakarta: LP3ES, 1986),p.123

Bahrin, Letkol Suwondo, Letkol Suprpto, Letkol A. Gani, Letkol Sutoko, Letkol Sukanda, Letkol Suryo Suyarso, Letkol S. Parman, Letkol Azis Saleh, Letkol Sumantri, dan Kolonel A.E. Kawilarang.³²

Sore harinya pada 17 Oktober 1952 tentara memutuskan jaringan telepon di seluruh Indonesia dan keluar negeri serta melarang terbit beberapa surat kabar seperti *Merdeka*, *Berita Indonesia*, dan *Mingguan Merdeka*. Enam tokoh politik di antaranya Muhammad Yamin, Kasman Singodimejo, Sukiman ditangkap dan setiap jam malam diberlakukan mulai pukul 8 malam “pertemuan yang dihadiri lebih dari lima orang”. Presiden meminta agar tuntutan tentara untuk membubarkan parlemen itu tidak diumumkan kepada wartawan. Tetapi ternyata ada pihak yang membocorkan kepada pers, pernyataan pimpinan AD itu dimuat dalam *Surat Kabar Merdeka*.³³

Namun, peristiwa tersebut kemudian memojokkan A. H. Nasution selaku KSAD. Suatu hal yang kemudian bahkan berlanjut dengan munculnya “perpecahan” di tubuh AD. Antara lain berupa “bocornya” dokumen BISAP (Biro Informasi Staf Angkatan Perang) yang dikeluarkan oleh Kolonel Zulkifli Lubis. Isi dokumen tersebut merupakan hasil dialog antara A. H. Nasution dengan Presiden Soekarno ketika mengajukan petisi di Istana yang

³² A. H. Nasution, *Peristiwa 17 Oktober 1952* (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2010), p.89

³³ Asvi Warman, *Seabad Kontroversi Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2007),p.56-57

mengesankan seolah-olah ia “menekankan” Presiden Soekarno dengan ancaman kudeta oleh pihak Angkatan Darat.

Laporan BISAP itu menuliskan bahwa Kolonel A. H. Nasution menyodorkan konsep dan minta agar presiden menanda tangani konsep tersebut. Konsep itu antara lain berisi pengumuman tentang adanya bahaya di seluruh Indonesia dan rencana penangkapan terhadap puluhan anggota parlemen serta sejumlah opsir TNI. Dokumen BISAP yang juga dikenal sebagai “Dokumen Lubis” atau Laporan Atrap No. 40 menyebar luas di kalangan partai-partai politik, pers, pemerintah dan bahkan seluruh teritoria militer. Tampaknya bagi sebagian panglima teritorium, laporan tersebut dianggap sebagai suatu dokumen resmi dan sah karena dikeluarkan Kementerian Pertahanan.³⁴

D. Dampak Terjadinya Peristiwa 17 Oktober 1952

Muncullah pro-kontra tentang Peristiwa 17 Oktober 1952 yang mengarah pada “perpecahan di tubuh AD. Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) mengalami kontra ofensif dari dalam dan luar. Antara lain dari parlemen, partai, pers dan presiden sendiri. Partai Nasional Indonesia, salah satu partai terbesar, pada bulan Desember 1952 mengeluarkan pernyataan yang menyerukan agar rakyat menghujat Peristiwa 17 Oktober 1952 itu

³⁴ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Jenderal Tanpa Pasukan Politisi Tanpa Partai: Perjalanan Hidup A. H. Nasution* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1998), p.89-90

sebagai suatu wujud perkosaan demokrasi, mendesak pemerintah untuk mempercepat usaha penyelesaian, serta memutasi KSAP Simatupang maupun Sekjen Menteri Pertahanan Mr. Ali Budiardjo.

Reaksi yang paling membahayakan integritas Angkatan Darat dan tentu kedudukan A. H. Nasution sebagai KSAD adalah terjadinya pengambilalihan panglima teritorium oleh para perwira setempat yang tidak setuju dengan Peristiwa 17 Oktober 1952. Di Tentara Teritorium (TT) VII Makasar, Letkol Warouw meng kudeta panglima setempat dengan terlebih dahulu mengumumkannya lewat radio setempat dan di hadapan perwira-perwira garnizun. Pengumuman tersebut berbunyi bahwa “telah terjadi percobaan kudeta di Jakarta yang diperoleh lewat BISAP, di mana KSAD A. H. Nasution memaksa Presiden Soekarno untuk menjadi diktator seraya menyodorkan konsep untuk ditandatangani.”³⁵

Letkol Warouw juga menambahkan bahwa Kolonel Mustopo memperoleh sejumlah dana dari PSI (Partai Sosialis Indonesia) untuk membiayai demonstrasi ke Istana. Sedangkan di TT V Brawijaya, Letkol Suwondo panglima setempat yang dianggap Pro-Peristiwa 17 Oktober 1952, telah dikenai tahanan rumah oleh perwira-perwira bawahannya. Di TT II Letkol Kosasih didaulat turun oleh bawahannya dan digantikan Letkol Kretarto. Situasi yang menjurus perpecahan itu bukan saja berdampak pada

³⁵ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Jenderal Tanpa Pasukan Politisi Tanpa Partai: Perjalanan Hidup A. H. Nasution* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1998), p.90

tubuh AD dan AP pada umumnya, tetapi dianggap dapat mengancam keutuhan Republik, maka A. H. Nasution mengambil inisiatif untuk melakukan sejumlah pendekatan. Ia juga mengadakan dialog dengan para perwira yang bertikai di berbagai daerah. Hal itu dilakukannya dengan para perwira Brawijaya maupun sejumlah pejabat yang berkompeten, seperti Menteri Pertahanan Hamengkubuwono IX dan KSAP Simatupang.³⁶

Untuk mempertanggung jawabkan terjadinya peristiwa tersebut, Jenderal A. H. Nasution mengundurkan diri dari jabatan KSAD digantikan oleh Kolonel Bambang Sugeng. Kesaksian Jenderal A. H. Nasution tentang Peristiwa 17 Oktober 1952 diuraikan: dalam ceramah ia yang diberi judul “17 Oktober 1952 dalam proses mencari posisi TNI dalam kehidupan bernegara”.³⁷

Tapi Menteri Pertahanan Hamengkubuwono IX meminta A. H. Nasution untuk merahasiakan dahulu surat edaran yang berisi pernyataan kesediaan berhenti dari jabatannya tidak menyebarluaskan. Hal itu harus dilakukan sambil menunggu “jalan keluar” yang akan ditempuh pemerintah sesuai dengan kehendak dan aspirasi semua pihak, termasuk A. H. Nasution sendiri.³⁸

³⁶ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Jenderal Tanpa Pasukan Politisi Tanpa Partai: Perjalanan Hidup A. H. Nasution* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1998), p.91

³⁷ A. H. Nasution, *Peristiwa 17 Oktober 1952* (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2010), p.94

³⁸ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Jenderal Tanpa Pasukan Politisi Tanpa Partai: Perjalanan Hidup A. H. Nasution* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1998), p.92

Adanya perpecahan dalam tubuh Angkatan Darat juga dijelaskan oleh Kolonel Bambang Sugeng (KSAD pengganti Jenderal Mayor A. H. Nasution). Kesaksian Kolonel Bambang Sugeng (mantan Panglima Divisi I Brawijaya). Menjelang akhir jabatannya sebagai Panglima Brawijaya karena kesehatannya, Kolonel Bambang Sugeng sering kali tidak aktif. Ia mengambil cuti karena sakit, tugas-tugas hariannya diselesaikan oleh Kepala Staf Divisi I/Brawijaya Letkol Dr. Suwondo. Pada saat itu terjadi peristiwa perdaulatan Panglima TKK Brawijaya sebagai akibat dari Peristiwa 17 Oktober 1952, datanglah 3 orang perwira menengah Angkatan Darat berpangkat Kolonel teman dan bekas anak buah Kolonel Bambang Sugeng (yaitu Kolonel Bambang Supeno, Kolonel Suhud dan Kolonel Sapari) menghadap Kolonel Bambang Sugeng yang sedang sakit menjelaskan bahwa keterlibatan Letkol Dr. Suwondo Panglima TT V/Brawijaya yang ikut mengambil bagian dalam peristiwa 17 oktober 1952.³⁹

Setelah itu, Kolonel Bambang Sugeng memanggil Letkol Dr. Suwondo yang berada di Malang dan belum lama datang dari Jakarta untuk datang ke Surabaya memberikan penjelasan tentang kejadian dan keterlibatannya dalam peristiwa 17 Oktober 1952. Letkol Dr. Suwondo datang ke Surabaya, tetapi bukannya memenuhi panggilan Kolonel Bambang

³⁹ A. H. Nasution, *Peristiwa 17 Oktober 1952* (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2010), p.94

Sugeng justru ia datang ke Surabaya untuk membatalkan radio yang sudah disiapkan Kolonel Bambang Sugeng dan digantinya dengan perintah harian yang disiarkan melalui RRI Surabaya. Sikap Letkol Dr. Suwondo memicu timbulnya konflik antara Kolonel Sugeng dengan Letkol Dr. Suwondo yang melebar sehingga terjadi saling curiga mencurigai di antara kedua pimpinan teritorium Brawijaya di seputar kedudukan masing-masing terkait dengan peristiwa 17 Oktober 1952.

Rencana yang disiapkan Letkol Dr. Suwondo tersebut gagal di laksanakan karena kedatangan Letkol Abimanyu dan PMT Surabaya yang meminta agar rencana penangkapan-penangkapan itu tidak dilaksanakan. Dengan pencabutan perintah harian tersebut maka keadaan dan situasi di Teritorium V/Brawijaya dapat dikendalikan. Pada tanggal 22 Desember 1952 Kolonel Bambang Sugeng diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai KSAD menggantikan Jenderal Mayor A. H. Nasution yang diberhentikan sebagai KSAD (karena harus bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952) dengan tugas untuk menyelesaikan keterangan-keterangan yang merabak di lingkungan Angkatan Darat pasca peristiwa 17 Oktober 1952.⁴⁰

Tentang penempatan meriam-meriam yang moncongnya dihadapkan ke Istana, A. H. Nasution menegaskan bahwa panser-panser polisi yang berjajar di depan Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) harus dihadapi

⁴⁰ A. H. Nasution, *Peristiwa 17 Oktober 1952* (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2010), p.95-98

dengan meriam, karena Angkatan Darat tidak memiliki senjata lain yang tepat. Tadinya ingin ditempatkan di lapangan Merdeka dan Banteng. Namun, ternyata kemudian diarahkan ke Istana dan DPR.⁴¹

⁴¹ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Jenderal Tanpa Pasukan Politisi Tanpa Partai: Perjalanan Hidup A. H. Nasution* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1998), p.93